

UMAR BIN KHATTAB: ISLAM SEBAGAI KEKUATAN POLITIK

Fitri Nurpita¹⁾, Arwan²⁾, Mely Cahyani³⁾

^{1,2,3)} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: fitrinurpita05@gmail.com¹, arwan@uin-suska.ac.id², melycahyaniipasca@gmail.com³

Info Artikel	Abstract
Keywords: <i>Umar ibn Khattab, Islamic Political Power, Islamic Government.</i> Kata kunci: <i>Umar Bin Khattab, Kekuatan Politik Islam, Pemerintahan Islam.</i>	<i>The development of Islam during the era of the Caliphs (Khalifah Rashidun) demonstrated that Islam developed not only as a religious teaching but also as a political force with widespread influence on social life. One key figure in this process was Umar ibn Khattab, known as the second caliph after Abu Bakr as-Siddiq. Umar ibn Khattab's leadership was a crucial period in Islamic history, marked by the expansion of Islamic territory, the strengthening of the government system, and the creation of social stability within society. This study aims to examine the role of Umar ibn Khattab's leadership in strengthening Islam as a political force and its impact on social development within Islamic civilization. This study uses a qualitative approach with library research, examining various literature sources related to the history of Umar ibn Khattab's reign. Data were analyzed descriptively to understand the political and social policies implemented during that period. The results show that Umar ibn Khattab's leadership succeeded in significantly expanding Islamic territory, establishing a more organized government administration system, and implementing social policies that created stability and justice in society. This demonstrates that the reign of Umar ibn Khattab played a crucial role in strengthening Islam's position as a political and social force in the history of world civilization.</i> Abstrak. Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berkembang sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang memiliki pengaruh luas dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tokoh penting dalam proses tersebut adalah Umar bin Khattab yang dikenal sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar ash-Shiddiq. Kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi periode penting dalam sejarah Islam karena ditandai oleh perluasan wilayah kekuasaan, penguatan sistem pemerintahan, serta terciptanya stabilitas sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepemimpinan Umar bin Khattab dalam memperkuat Islam sebagai kekuatan politik serta dampaknya terhadap perkembangan sosial dalam peradaban Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan sejarah pemerintahan Umar bin Khattab. Data dianalisis secara deskriptif untuk memahami kebijakan politik dan sosial yang diterapkan pada masa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Umar bin Khattab berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam secara signifikan, membangun sistem administrasi pemerintahan yang lebih terorganisasi, serta menerapkan kebijakan sosial yang mampu menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masa pemerintahan Umar bin Khattab memiliki peran penting dalam memperkuat posisi Islam sebagai kekuatan politik dan sosial dalam sejarah peradaban dunia.

PENDAHULUAN

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa perkembangan Islam tidak hanya berlangsung dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam bidang politik, sosial, dan pemerintahan. Sejak masa awal kemunculannya, Islam telah membentuk suatu tatanan masyarakat yang berlandaskan nilai-

nilai spiritual sekaligus memiliki sistem sosial dan politik yang terorganisasi. Perkembangan tersebut semakin terlihat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ketika kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin yang berperan penting dalam menjaga stabilitas umat serta memperluas pengaruh Islam di berbagai wilayah.

Salah satu tokoh yang memiliki peran besar dalam periode tersebut adalah Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam sejarah Islam. Kepemimpinan Umar bin Khattab sering dipandang sebagai salah satu fase penting dalam perkembangan Islam sebagai kekuatan politik. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Islam mengalami perluasan yang sangat signifikan dan mencakup berbagai kawasan strategis di Timur Tengah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Islam pada masa tersebut tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang mampu mempengaruhi dinamika kekuasaan di berbagai wilayah.

Selain dikenal karena keberhasilan dalam memperluas wilayah kekuasaan, Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih tertata. Berbagai kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahannya menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat struktur administrasi negara, menjaga stabilitas politik, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dalam mengatur masyarakat yang semakin luas dan beragam (Suparman, 2024).

Kepemimpinan Umar bin Khattab juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat Islam. Stabilitas politik yang tercipta pada masa pemerintahannya turut mendorong terbentuknya tatanan sosial yang lebih teratur, serta membuka ruang bagi perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah kekuasaan Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi penting untuk memahami bagaimana Islam berkembang sebagai kekuatan politik dalam sejarah peradaban dunia. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran Umar bin Khattab dalam memperkuat Islam sebagai kekuatan politik serta melihat dampaknya terhadap perkembangan masyarakat dan peradaban Islam pada masa tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai sumber tertulis (Sugiyono, 2020) yang berkaitan dengan kepemimpinan Umar bin Khattab serta perkembangan Islam sebagai kekuatan politik. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur seperti buku sejarah Islam, artikel ilmiah, serta sumber-sumber akademik yang relevan dengan topik kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai referensi yang membahas biografi Umar bin Khattab, kebijakan politik pada masa pemerintahannya, serta dampak sosial yang muncul dalam masyarakat. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan kepemimpinan Umar bin Khattab serta menganalisisnya untuk memahami peranannya dalam memperkuat Islam sebagai kekuatan politik dan sosial dalam peradaban Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Singkat Umar bin Khattab

Umar bin Khattab merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam dan termasuk dalam jajaran Khulafaur Rasyidin. Ia lahir di Makkah sekitar tahun 584 M dari kabilah Quraisy, tepatnya dari Bani Adi, sebuah klan yang memiliki posisi terhormat dalam struktur sosial

masyarakat Arab saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail, sementara ibunya adalah Hantamah binti Hasyim. Dalam tradisi masyarakat Quraisy, keluarga Umar dikenal memiliki peran dalam urusan diplomasi dan penyelesaian sengketa antar kabilah, sehingga sejak kecil Umar telah terbiasa dengan dinamika sosial dan politik masyarakat Arab (Jamaluddin & Suhdi, 2024).

Pada masa mudanya, Umar dikenal sebagai pribadi yang memiliki karakter kuat, tegas, serta memiliki kemampuan fisik dan intelektual yang menonjol. Berbeda dengan sebagian masyarakat Arab pada masa itu yang buta huruf, Umar termasuk orang yang mampu membaca dan menulis. Kemampuan ini menjadikannya salah satu tokoh Quraisy yang disegani. Ia juga dikenal sebagai pedagang yang sering melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, seperti Syam, sehingga memiliki wawasan yang relatif luas tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik di luar Jazirah Arab (Fitriani *et al*, 2025).

Sebelum memeluk Islam, Umar merupakan salah satu penentang keras dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ia melihat ajaran Islam sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan kepercayaan tradisional masyarakat Quraisy. Penentangannya terhadap Islam bahkan sempat membawanya pada niat untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun, dalam perjalanan menuju rencana tersebut, Umar justru mendapatkan kabar bahwa saudara perempuannya sendiri telah memeluk Islam. Peristiwa tersebut menjadi titik balik penting dalam perjalanan hidup Umar bin Khattab. Setelah mendengar bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dari Surah Taha yang dibaca oleh saudara perempuannya, hatinya tersentuh dan ia mulai mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap Islam. Peristiwa tersebut akhirnya mengantarkan Umar untuk menemui Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya secara terbuka (Fitriani *et al*, 2025).

Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Dalam masa pemerintahan Abu Bakar, Umar berperan sebagai penasihat utama yang sering memberikan pandangan strategis dalam berbagai persoalan umat, termasuk dalam menghadapi pemberontakan dan menjaga stabilitas komunitas Muslim yang masih muda. Kedekatan dan kepercayaan Abu Bakar terhadap Umar membuatnya sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting dalam pemerintahan. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya untuk memimpin umat Islam. Penunjukan ini didasarkan pada pertimbangan mengenai integritas, ketegasan, serta kapasitas kepemimpinan Umar yang dinilai mampu menjaga stabilitas dan memperkuat pemerintahan Islam yang sedang berkembang. Setelah wafatnya Abu Bakar pada tahun 634 M, Umar resmi diangkat sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam (Al-Azizi, 2021).

Kepribadian Umar yang tegas, adil, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat menjadikannya sosok pemimpin yang dihormati sekaligus disegani. Karakter kepemimpinannya tidak hanya mencerminkan ketegasan dalam menjalankan hukum, tetapi juga menunjukkan kepekaan sosial yang tinggi terhadap kondisi rakyatnya. Kombinasi antara ketegasan, integritas moral, serta visi kepemimpinan inilah yang kemudian menjadikan masa pemerintahan Umar bin Khattab sebagai salah satu periode penting dalam perkembangan politik dan peradaban Islam.

B. Kekuatan Politik pada Masa Umar bin Khattab

Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama sekitar 10 tahun, dari tahun 634 hingga 644 M. Masa pemerintahan Umar bin Khattab merupakan salah satu periode penting dalam sejarah politik Islam. Pada masa ini, Islam mengalami transformasi yang signifikan dari sebuah komunitas religius yang berkembang di Jazirah Arab menjadi kekuatan politik yang memiliki pengaruh luas di

kawasan Timur Tengah. Kepemimpinan Umar ditandai oleh keberhasilan dalam memperluas wilayah kekuasaan, memperkuat sistem pemerintahan, serta menciptakan stabilitas sosial di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam (Elfadhilah *et al*, 2024). Perkembangan Islam sebagai kekuatan politik pada masa Umar bin Khattab dapat dipahami melalui beberapa aspek penting sebagai berikut.

1. Perluasan Wilayah Kekuasaan Islam

Salah satu faktor utama yang menunjukkan kuatnya posisi politik Islam pada masa Umar adalah keberhasilan ekspansi wilayah yang sangat luas. Dalam kurun waktu sekitar satu dekade, wilayah kekuasaan Islam berkembang jauh melampaui Jazirah Arab dan mencakup berbagai daerah strategis di kawasan Timur Tengah. Keberhasilan ekspansi ini tidak hanya memperluas wilayah pemerintahan Islam, tetapi juga mengubah peta kekuasaan dunia pada abad ke-7.

Pasukan Muslim berhasil menaklukkan berbagai wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan dua kekaisaran besar dunia pada masa itu, yaitu Kekaisaran Bizantium (Romawi Timur) dan Kekaisaran Sasaniyah di Persia. Beberapa kemenangan penting yang menandai keberhasilan ekspansi tersebut antara lain Pertempuran Yarmuk yang membuka jalan bagi penguasaan wilayah Syam, serta Pertempuran al-Qadisiyyah yang menjadi titik awal runtuhnya dominasi Persia di kawasan tersebut. Selain itu, kota suci Yerusalem juga berhasil berada di bawah pemerintahan Islam melalui proses penyerahan damai kepada Umar bin Khattab (Khalid *et al*, 2024).

Perluasan wilayah ini tidak hanya menunjukkan kekuatan militer umat Islam, tetapi juga memperkuat posisi politik pemerintahan Islam sebagai kekuatan baru yang diperhitungkan dalam dinamika geopolitik kawasan. Wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan imperium besar kini menjadi bagian dari dunia Islam, sehingga membuka ruang bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya dalam peradaban Islam. Dalam mengelola wilayah yang luas, Umar juga membangun kota-kota garnisun seperti Kufah, Basrah, dan Fustat yang berfungsi sebagai pusat militer, administrasi, serta pemukiman bagi pasukan Muslim. Kota-kota ini kemudian berkembang menjadi pusat peradaban Islam di berbagai wilayah (Liasari, 2023).

2. Konsolidasi dan Penguatan Struktur Pemerintahan

Keberhasilan ekspansi wilayah tentu memerlukan sistem pemerintahan yang mampu mengelola wilayah yang luas dan masyarakat yang beragam. Dalam hal ini, Umar bin Khattab menunjukkan kemampuan administratif yang sangat baik dengan membangun struktur pemerintahan yang lebih terorganisasi. Ia menyadari bahwa stabilitas politik tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan yang efektif.

Salah satu langkah penting yang dilakukan Umar adalah membentuk sistem administrasi negara yang lebih sistematis melalui lembaga yang dikenal sebagai **Diwan**, yaitu lembaga pencatatan administrasi yang mengatur berbagai urusan negara, termasuk distribusi gaji bagi tentara dan aparatur pemerintahan. Sistem ini menjadi salah satu bentuk awal birokrasi dalam pemerintahan Islam dan membantu menciptakan pengelolaan negara yang lebih tertib. Salah satu kebijakan penting pada masa Umar bin Khattab adalah penetapan kalender Hijriyah sebagai sistem penanggalan resmi dalam administrasi pemerintahan Islam. Kalender ini dihitung sejak peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah dan digunakan untuk mengatur berbagai urusan administratif serta keagamaan dalam negara Islam (Suparman, 2024).

Selain itu, Umar juga memperkuat fungsi **Baitul Mal** sebagai lembaga pengelola keuangan negara. Melalui lembaga ini, berbagai sumber pendapatan negara seperti zakat, jizyah,

kharaj, dan ghanimah dikelola secara lebih terorganisasi dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membiayai administrasi negara, pembangunan fasilitas publik, serta memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan (Arniati, 2024). Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Islam pada masa Umar telah memiliki sistem administrasi dan pengelolaan keuangan yang relatif maju pada masa tersebut.

3. Strategi Politik dan Kebijakan Administrasi Negara

Kekuatan politik Islam pada masa Umar juga didukung oleh strategi politik yang bijaksana dalam mengelola wilayah yang baru ditaklukkan. Umar tidak hanya fokus pada perluasan wilayah, tetapi juga berupaya memastikan bahwa wilayah-wilayah tersebut dapat dikelola secara stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ia menerapkan kebijakan administrasi yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat.

Salah satu kebijakan penting yang diterapkan Umar adalah pembagian wilayah kekuasaan Islam ke dalam beberapa provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur atau **amir**. Para gubernur tersebut dipilih berdasarkan integritas, kemampuan, serta komitmen mereka terhadap nilai-nilai keadilan. Umar juga dikenal sangat tegas dalam mengawasi para pejabat pemerintahannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ia bahkan melakukan evaluasi terhadap kinerja para gubernur dan tidak segan memberhentikan mereka jika terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, Umar menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan pemerintahan dengan memisahkan fungsi administratif dan fungsi peradilan. Ia mengangkat para hakim atau **qadhi** di berbagai wilayah untuk menangani persoalan hukum secara independent (Delima *et al*, 2024). Kebijakan ini membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil serta memperkuat legitimasi politik pemerintahan Islam di mata masyarakat.

4. Legitimasi Sosial dan Stabilitas Kekuasaan

Selain kekuatan militer dan administrasi yang kuat, kekuasaan politik Islam pada masa Umar juga didukung oleh legitimasi sosial dari masyarakat. Dalam mengelola wilayah yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan agama, Umar menerapkan kebijakan yang relatif toleran terhadap masyarakat non-Muslim. Mereka diberikan perlindungan serta kebebasan untuk menjalankan agama dan tradisi mereka selama mematuhi aturan yang berlaku dalam pemerintahan Islam.

Kebijakan ini tercermin dalam penerapan sistem **ahl al-dhimmah**, yaitu perlindungan negara terhadap masyarakat non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Sebagai imbalannya, mereka membayar jizyah sebagai bentuk kontribusi kepada negara dan sebagai pengganti kewajiban militer. Sistem ini memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat non-Muslim sekaligus menjaga stabilitas sosial di wilayah yang beragam (Zauman *et al*, 2024).

Pendekatan tersebut membantu menciptakan stabilitas sosial di berbagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam. Banyak masyarakat lokal yang menerima pemerintahan Islam karena kebijakan yang diterapkan dianggap lebih adil dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya (Zauman *et al*, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan politik Islam pada masa Umar tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kebijakan pemerintahan yang mampu menciptakan kepercayaan masyarakat.

5. Konsultasi Politik melalui Majelis Syura

Kekuatan politik pada masa pemerintahan Umar bin Khattab juga tercermin dalam praktik pengambilan keputusan politik yang melibatkan musyawarah atau konsultasi dengan para sahabat terkemuka. Tradisi ini dikenal sebagai **majlis syura**, yaitu forum permusyawaratan yang digunakan untuk membahas berbagai persoalan penting yang berkaitan dengan

kepentingan umat dan negara. Praktik syura menjadi salah satu prinsip penting dalam pemerintahan Islam pada masa awal, karena memberikan ruang bagi partisipasi tokoh-tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam menjalankan pemerintahan, Umar tidak memutuskan berbagai persoalan secara sepihak. Ia sering mengundang para sahabat senior untuk berdiskusi dan memberikan pandangan mengenai berbagai kebijakan yang akan diambil. Tokoh-tokoh seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf termasuk di antara sahabat yang sering dilibatkan dalam musyawarah tersebut (Sirojuddin, 2018).

Praktik syura ini memiliki peran penting dalam memperkuat legitimasi politik pemerintahan Islam. Keputusan yang dihasilkan melalui proses musyawarah cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat karena melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki otoritas moral dan sosial dalam komunitas Muslim. Dengan demikian, majelis syura tidak hanya berfungsi sebagai forum konsultasi, tetapi juga sebagai mekanisme yang membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan.

Selain itu, penerapan prinsip syura juga mencerminkan nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam mengelola urusan masyarakat. Umar memandang bahwa kepemimpinan bukanlah bentuk kekuasaan absolut, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan melibatkan pertimbangan dari berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman (Syafuri, 2025).

Dengan adanya praktik majelis syura, pemerintahan pada masa Umar bin Khattab menunjukkan bahwa kekuatan politik Islam tidak hanya dibangun melalui kekuasaan militer atau administrasi negara, tetapi juga melalui mekanisme konsultasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat stabilitas pemerintahan sekaligus menciptakan sistem kepemimpinan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.

C. Dampak Sosial Peradaban Islam pada Masa Umar bin Khattab

Kepemimpinan Umar bin Khattab tidak hanya membawa perubahan dalam aspek politik dan pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam. Perluasan wilayah dan penguatan sistem administrasi negara pada masa Umar menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil serta membuka ruang bagi terbentuknya masyarakat yang lebih terorganisasi dan berkeadilan. Hal ini menjadikan masa pemerintahannya sebagai salah satu periode penting dalam proses pembentukan struktur sosial dalam peradaban Islam (Amaliyah *et al*, 2025).

Salah satu dampak sosial yang paling menonjol adalah terjadinya integrasi berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki latar belakang budaya, etnis, dan agama yang berbeda. Setelah wilayah-wilayah seperti Syam, Irak, Persia, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Islam, masyarakat Muslim hidup berdampingan dengan komunitas non-Muslim seperti kaum Nasrani, Yahudi, dan penganut agama-agama lokal. Dalam situasi ini, Umar menerapkan kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap kelompok non-Muslim melalui sistem perjanjian yang menjamin keamanan jiwa, harta, serta kebebasan menjalankan ibadah mereka.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan penerapan sistem *ahl al-dhimmah*, yaitu perlindungan negara terhadap masyarakat non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Dalam sistem ini, kelompok non-Muslim mendapatkan jaminan keamanan dan kebebasan menjalankan kehidupan sosial serta keagamaannya, sementara mereka memberikan kontribusi kepada negara

dalam bentuk pajak jizyah (Zauman *et al*, 2024). Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Islam pada masa Umar tidak bertujuan untuk memaksakan keyakinan agama kepada masyarakat yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Sebaliknya, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan identitas sosial dan keagamaannya selama mereka mematuhi aturan yang berlaku. Pendekatan ini berkontribusi pada terciptanya stabilitas sosial serta meminimalkan konflik antara kelompok masyarakat yang berbeda.

Selain itu, kebijakan sosial Umar juga menunjukkan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap kondisi rakyatnya, terutama kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi. Melalui pengelolaan **Baitul Mal**, negara menyediakan bantuan bagi fakir miskin, anak yatim, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Dalam beberapa catatan sejarah bahkan disebutkan bahwa negara memberikan tunjangan kepada anak-anak, para janda, serta lansia sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat (Amaliyah *et al*, 2025).

Umar juga dikenal sering melakukan pengawasan langsung terhadap kondisi masyarakat. Ia kerap melakukan patroli pada malam hari untuk memastikan tidak ada rakyatnya yang mengalami kesulitan hidup tanpa diketahui oleh pemerintah. Sikap ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Umar tidak hanya berorientasi pada pengelolaan kekuasaan, tetapi juga pada upaya mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat (Suparman, 2024). Tindakan tersebut memperlihatkan bahwa seorang pemimpin dalam tradisi politik Islam memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya.

Di samping itu, stabilitas politik dan administrasi yang dibangun pada masa Umar juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Keamanan yang terjaga di berbagai wilayah memungkinkan aktivitas perdagangan berkembang dengan lebih baik. Jalur perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah di bawah kekuasaan Islam menjadi lebih aman sehingga mendorong interaksi ekonomi antarwilayah. Kota-kota seperti Kufah, Basrah, dan Fustat mulai berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya dalam dunia Islam. Perkembangan tersebut secara tidak langsung mempercepat proses pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, serta pengalaman sosial di antara berbagai komunitas yang berada dalam wilayah kekuasaan Islam. Interaksi yang terjadi antara masyarakat Arab dengan masyarakat Persia, Romawi Timur, serta berbagai kelompok etnis lainnya turut memperkaya dinamika sosial dan kebudayaan dalam peradaban Islam (Elfadhilah *et al*, 2024).

Dengan demikian, masa pemerintahan Umar bin Khattab tidak hanya menandai berkembangnya Islam sebagai kekuatan politik, tetapi juga sebagai fase penting dalam pembentukan tatanan sosial yang lebih adil dan terorganisasi. Kebijakan-kebijakan sosial yang diterapkan menunjukkan bahwa pemerintahan Islam pada masa tersebut berusaha menciptakan keseimbangan antara kekuasaan politik, stabilitas masyarakat, serta kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk di wilayah kekuasaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Umar bin Khattab memiliki peran penting dalam perkembangan Islam sebagai kekuatan politik. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Islam mengalami perluasan yang signifikan sekaligus diiringi dengan penguatan sistem pemerintahan yang lebih terorganisasi. Berbagai kebijakan administrasi, pengelolaan keuangan negara, serta penerapan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan menunjukkan kemampuan Umar dalam membangun tata kelola

pemerintahan yang efektif. Selain itu, kebijakan sosial yang memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat turut menciptakan stabilitas sosial di wilayah kekuasaan Islam. Dengan demikian, masa pemerintahan Umar bin Khattab menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan peradaban Islam pada bidang politik, sosial, dan pemerintahan.

REFERENCES

- Al-Azizi, A. S. 2021. *"Umar Bin Khattab R.A."*. Yogyakarta: Diva Press.
- Amaliyah, H., et al. 2025. *"Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab dalam Perubahan Sosial dan Pengembangan Pendidikan Islam pada Masa Pemerintahannya"*. Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. 1(4).
- Arniati. 2024. *"Rekontruksi Praktik Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab di Baitul Mal Aceh"*. FATHIR: Jurnal Studi Islam. 1(1).
- Delima, D. A., Yusdiah P., & Roza, E. 2024. *"Perkembangan Wilayah Islam Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab"*. Journal on Education. 7(1).
- Elfadhilah, P. N., et al. 2024. *"Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab"*. Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah. 2(1).
- Fitriani, D. F., et al. 2025. *"Biografi Umar Bin Khattab"*. Psikospopen : Jurnal Psikososial dan Pendidikan. 1(1).
- Jamaluddin & Suhdi, S. 2024. *"Sejarah Dakwah"*. Jawa Barat: CV Adanu Abimata.
- Khalid, Muhammad Idkham et al. 2024. *"Islam Sebagai Kekuatan Politik Perspektif Umar bin Khatab"*. Jurnal Studi Keagamaan Islam. 2(4).
- Liasari, D. 2023. *"Perkembangan Kota Awal Islam: Kufah, Basrah dan Fustat"*. Jurnal: Local History & Heritage. 3(1).
- Sirojuddin. 2018. *"Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman. 2024. *"Mengupas Tuntas Kebijakan-kebijakan Pemerintahan Umar Bin Khattab"*. Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora. 2(1).
- Syafuri, H.B. 2025. *"Fiqih Siyasah Di Era Globalisasi"*. Sumedang: **Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja**.
- Zauman, W. O. R., et al. 2024. *"Pelantikan dan Kepemimpinan Umar Bin Khattab: Analisis Biografi dan Kebijakan Politiknya Selama Kekhalifahan"*. Ulil Albab: Jurnal Multidispilin. 4(1).